

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok tahun 2022 tersebut, kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti adalah kolaborasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Kota Layak Anak telah berjalan baik dan memberikan dampak positif yang di mana diukur dengan menggunakan teori *collaborative governance* oleh Emerson, Nabatchi, & Balogh dengan 3 (tiga) indikator pengukuran, yaitu:

##### **5.1.1 Upaya Kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok Tahun 2022**

Pada dimensi dinamika kolaborasi dari kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok tahun 2022 telah terlaksana dengan baik di mana proses kolaborasi telah melaksanakan indikator penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan tindakan bersama. Namun dalam proses kolaborasi tersebut memiliki kendala terkait dengan bahwa lembaga lain yang ikut berperan dalam perwujudan Kota Depok menjadi Kota Layak Anak memiliki tupoksi tugas masing-masing sehingga dalam mengkoordinasikan mengenai upaya perwujudan Kota Layak Anak merupakan salah satu kendala yang dihadapi.

Pada dimensi tindakan-tindakan kolaborasi dalam kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok tahun 2022 juga terlaksana dengan cukup baik, tindakan kolaborasi dimulai dengan memfasilitasi setiap proses kolaborasi yang akan dilakukan dalam upaya

mewujudkan Kota Depok menjadi Kota Layak Anak, memberikan fasilitas berupa pemberian ruang gerak kepada para intansi dan *stakeholder* terkait serta memberikan edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang Kota Layak Anak. Inovasi seperti layar ceria dan Taman Baca Masyarakat (TBM) merupakan contoh dari inovasi yang dihasilkan dari proses kolaborasi dalam pemenuhan indikator Kota Layak Anak pada klaster I mengenai Hak Sipil dan Kebebasan.

### **5.1.2 Dampak Kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok Tahun 2022**

Pada dimensi dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok tahun 2022 sudah terlaksana dengan baik dan menghasilkan dampak yang positif, dampak positif berupa peningkatan dalam kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA). Namun demikian persentase kepemilikan KIA pada anak usia 0-16 di Kota Depok tersebut masih rendah. Dimana hanya 1/2 anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA. Dampak positif lainnya adalah meningkatnya fasilitas informasi layak anak yang diwujudkan melalui inovasi pengembangan Perpustakaan Keliling dan Taman Baca Masyarakat (TBM.), serta tersedianya lembaga partisipasi anak melalui keberadaan forum anak

Berdasarkan pada beberapa dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok tahun 2022 telah terlaksana dengan baik namun masih ada kendala yang dihadapi, dikarenakan setiap instansi dan *stakeholder* lain memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing sehingga tidak bisa selalu berfokus pada pengembangan Kota Layak Anak.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian yang dilaksanakan, maka saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok tahun 2022 mencakup sebagai berikut:

### 5.2.1 Saran Teoritis

- 1) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat menggali secara mendalam terkait berbagai sumber dan juga referensi yang akan digunakan dalam melakukan penelitian, khususnya mengenai kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok tahun 2022.
- 2) Bagi peneliti berikutnya, sebaiknya dapat melaksanakan penelitian dengan spesifik dan juga mendalam mengenai kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok tahun 2022.
- 3) Hasil penelitian ini hanya terfokus pada kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok tahun 2022. Sehingga, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menggali penelitian mengenai evaluasi dan monitoring dari dampak dan adaptasi dalam proses kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok tahun 2022.

### 5.2.2 Saran Praktis

- 1) Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok sebagai *leading* sektor dalam perwujudan Kota Depok menjadi Kota Layak Anak agar dapat mengkoordinir lagi terkait dinamika kolaborasi yang dilakukan

dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Menyelesaikan hambatan terkait dengan bahwa masing-masing instansi dan *stakeholder* lain yang tergabung dalam gugus tugas Kota Layak Anak memiliki tupoksi masing-masing sehingga menghambat proses koordinasi, melalui Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak.

- 2) Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok sebagai *leading* sektor dalam perwujudan Kota Depok menjadi Kota Layak Anak agar dapat meningkatkan tindakan-tindakan kolaborasi melalui inovasi dan sosialisasi, serta mengembangkan inovasi yang sudah ada agar perwujudan Kota Depok menjadi Kota Layak Anak dapat tercapai.
- 3) Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok sebagai *leading* sektor dalam perwujudan Kota Depok menjadi Kota Layak Anak agar dapat melakukan evaluasi dan monitoring terkait dampak positif dari proses kolaborasi yang dilakukan agar dampak baik yang dihasilkan dapat dipertahankan dan mengalami peningkatan.